

KERAGAAN USAHATANI KOPDI DI LAMPUNG SERTA PELUANG PENGEMBANGANNYA KEDEPAN

WAYAN SUDANA¹ DAN JUMAKIR²

¹ **Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian Bogor**
² **Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di sentra produksi kopi rakyat di Desa Way Harong, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui keragaman teknologi usahatani kopi rakyat serta faktor pendukung agribisnis kopi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi usahatani kopi yang diterapkan petani relatif sederhana, pemupukan jarang dilakukan, pemilihan tanaman kopi kurang intensif. Akibatnya produktivitas kopinya menjadi rendah yaitu rata-rata dibawah 500 kg biji kopi kering/ha/tahun, produktivitas ini dibawah potensi hasil yang dapat dicapai, sehingga masih terdapat sejangk hasil yang cukup tinggi antara produktivitas petani dengan produktivitas hasil penelitian. Kelengkapan kelompok tani belum berfungsi secara maksimal, modal tunai ditingkat petani sangat terbatas dan tidak ada fasilitas kredit usahatani. Sedangkan kelengkapan input seperti kios sarana produksi ditingkat petani cukup memadai, kelengkapan pemasaran hasil dan industri pengolahan hasil kopi keberadaanya terjadi ditingkat eksportir merupakan biaya tataniaga, petani hanya menikmati 50 persen saja dari harga yang terjadi ditingkat eksportir.

Kata kunci : kopi, teknologi, faktor pendukung agribisnis dan pengembangan.

PENDAHULUAN

Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki perkembangan perekonomian paling pesat dibanding pulau-pulau lainnya, hal ini mengakibatkan pertanian di pulau Jawa mendapat tekanan dalam pemanfaatan sumberdaya dasar (resource based), dari berbagai sektor ekonomi, karena aktivitas ekonomi membutuhkan ruang dalam pengembangannya (Nasoetion 1995). Sehingga alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Jawa tidak dapat dielakan. Menurut Nasoetion (1994), setiap tahunnya tidak kurang dari 50.000 ha sawah beririgasi teknis beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Akibat dari alih fungsi lahan tersebut, faktor produksi lahan menjadi semakin langka di tingkat petani.

Apabila hal ini terus berlangsung maka akan dapat mengancam pembangunan pertanian dalam arti luas. Salah satu jalan yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut adalah melalui reservasi lahan pertanian (Trawan 2000). Disamping itu hal yang bisa dilakukan adalah melalui optimalisasi penggunaan lahan, khususnya lahan kering di luar Jawa. Walaupun lahan ini telah diusahakan petani dengan berbagai tanaman baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan khususnya kopi, namun produktivitasnya dilaporkan relatif masih rendah (Hutabarat, dkk. 2003)

Hasil survei dilakukan oleh Sudana, dkk. (2003) di Lampung pada lahan kering berbasis tanaman kopi, menunjukkan bahwa produksi kopi per hektar yang dapat dicapai petani saat ini masih dibawah potensi hasil lahannya. Rata-rata produksi kopi (biji kering) yang diperoleh sekitar 500 hingga 600 kg/ha, sedang berdasarkan potensi lahan, produktivitasnya dapat mencapai 1 hingga 2 ton/ha (Martadinata dan Wardani 1996). Oleh sebab itu masih terdapat peluang untuk

menekan senjang hasil yang terjadi melalui perbaikan teknologi usahatani kopi khususnya, agar lahan dapat dimanfaatkan menjadi lebih optimal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi, masalah dan peluang pengembangan kopi serta faktor-faktor yang mendukung berkembangnya agribisnis usahatani kopi ditingkat petani. Informasi ini diharapkan berguna dalam upaya peningkatan usahatani kopi rakyat agar penggunaan lahan yang semakin langka menjadi lebih optimal.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan pada TA. 2003 fokus kajian adalah untuk mengetahui potensi, masalah dan peluang pengembangan usahatani kopi kedepan. Penelitian ini dilakukan disentra produksi kopi di Provinsi Lampung yaitu di Desa Way Harong, Kecamatan Pulau Pangung, kabupaten Tanggamus. Pemilihan desa dilakukan secara sengaja, yaitu sentra produksi kopi, dimana sumber pendapatan keluarga sebagian besar dari hasil usahatani kopi.

Untuk dapat menjawab tujuan penelitian dilakukan wawancara kepada satu kelompok tani kopi yang beranggotakan 30 orang. Kelompok tani yang dipilih diharapkan dapat mewakili (representatif) dari petani kopi di Lampung. Variabel yang ditanyakan telah disusun dalam daftar pertanyaan (kuisener) semi struktur. Untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan juga di gali data lewat Dinas terkait baik ditingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi, data yang dikumpulkan dipilah menjadi data primer dan skunder.

Setelah data terkumpul melalui kuisener, kemudian data diolah atau di tabulasi, secara manual dan komputer. Kemudian data dianalisis secara sederhana untuk dapat menjawab tujuan penelitian. Data yang telah dianalisis ditampilkan berupa tabel analisis, untuk mempermudah menginterpretasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Luas Areal dan Produktivitas

Komoditas kopi yang ada di Indonesia sebagian besar adalah merupakan tanaman perkebunan rakyat, dimana total luas arealnya menurut data dari Dijenbun (2002), mencapai 94,61 persen dari total areal perkebunan kopi, sisanya kurang dari 6% merupakan perkebunan besar dan swasta. Berdasarkan data luas tanaman kopi, dapat dikatakan bahwa basis perkebunan kopi di Indonesia bertumpu pada perkebunan rakyat. Jenis kopi diusahakan di Indonesia dominan adalah kopi Robusta, sedangkan jenis Arabika jumlahnya relatif kecil.

Bila dilihat dari Tabel 1, perkembangan luas areal kurun waktu 13 tahun terakhir yaitu dari tahun 1990 hingga 2002, untuk perkebunan rakyat tidak menunjukkan laju yang mengembirakan yaitu rata-rata perkembangan pertahunnya kurang dari satu persen yaitu 0,92%, hanya perkebunan besar nasional yang menunjukkan laju perkembangan cukup positif yaitu rata-rata 4,3% pertahunnya, sedangkan perkebunan besar swasta malah mengalami penurunan dengan rata-rata laju penurunan pertahunnya 1,49%. Sehingga pada kurun waktu tersebut secara agregat laju pertumbuhan luas

areal kopi nasional hanya rata-rata 1,24% per tahunnya. Bila dipilah perkembangan luas areal tanaman kopi ini antara sebelum terjadinya krisis ekonomi yaitu tahun 1997 kebawah dan pasca krisis yaitu setelah tahun 1998, tidak terjadi laju perkembangan luas yang signifikan. Dimana secara nasional laju perkembangan luas areal antara sebelum krisis dan pasca krisis relatif sama yaitu 1,21% dan 1,25% per tahunnya.

Table 1. Perkembangan Luas Areal, Produktivitas Kopi di Indonesia, 1990 – 2002

Tahun	Luas Areal (Ha)			Produktivitas (Ku/ha)				
	PR	PBN	PBS	PR	PBN	PBS	PBS	Total
1990	1014125	25834	29889	1069848	3,79	6,03	4,26	3,85
1991	1063289	25891	30674	1119854	3,75	6,47	4,06	3,82
1992	1076474	26092	31332	1133898	3,80	6,47	3,58	3,85
1993	1090050	26325	31192	1147567	3,76	6,56	3,70	3,82
1994	1080532	26593	33260	1140385	3,90	6,57	3,32	3,95
1995	1109499	25616	32396	1167511	3,87	6,57	3,52	3,92
1996	1103615	24169	31295	1159079	3,95	5,45	3,28	3,96
1997	1105114	32232	32682	1170028	3,58	6,53	3,43	3,66
1998	1068064	39139	46166	1153369	4,40	6,58	4,12	4,46
1999	1059245	39316	28716	1127277	4,66	6,67	4,02	4,72
2000	1192322	40645	27720	1260687	4,32	7,32	3,58	4,40
2001	1200659	40645	27720	1269024	4,39	7,34	3,69	4,47
2002	1201008	40665	27720	1269393	4,40	7,35	3,75	4,48
Rata 2	1104923	31782	31597	1071326	4,04	6,61	3,72	4,10
Rata2 trend	0,92	4,30	1,49	1,24	3,46	1,25	0,51	1,74
(%/)/hn								
Trend sebelum krisis	1,02	1,57	1,05	1,21	(0,03)	(0,24)	(3,36)	(1,21)
Trend pasca krisis	0,89	5,21	(2,34)	1,25	4,29	1,75	1,80	2,61

Sumber: Digenbun, 2002

Keterangan : PR (perkebunan Rakyat)
 PBN(perkebunan besar nasional)
 PBS (perkebunan besar swasta)
 Sebelum krisis adalah tahun1997 kebawah
 Setelah krisis adalah tahun 1998 keatas
 Nilai dalam kurung () berarti minus

Perkembangan produktivitas kopi per hektar selama kurun waktu tersebut (1990 hingga 2002), juga tidak menunjukkan perkembangan yang menggembirakan hanya perkebunan rakyat yang menunjukkan laju peningkatan pertahunnya yang lebih baik dibandingkan perkebunan lainnya, yaitu dengan laju 3,46% dibandingkan 1,25 persen untuk perkebunan besar nasional dan 0,51 persen untuk perkebunan besar swasta. Sehingga laju perkembangan produktivitas kopi secara nasional kurun waktu tersebut hanya 1,74%/ tahunnya.

Sedangkan bila dipilah antara laju peningkatan produktivitas sebelum terjadinya krisis ekonomi dan pasca terjadinya krisis ekonomi, terlihat ada perbedaan yang cukup berarti. Dimana secara nasional laju peningkatan produktivitas setelah terjadinya krisis ekonomi meningkat 115% dibandingkan dengan sebelum terjadinya krisis, yaitu dari 1,21% menjadi 2,61% pertaunnya. Depresiasi nilai rupiah akibat krisis mengakibatkan harga kopi ditingkat petani (*farm gate price*)

saat itu meningkat 4 - 5 kali dari harga kopi sebelumnya, hal ini membawa dampak terhadap peningkatan produktivitas kopi melalui perbaikan budidaya khususnya melalui pemupukan.

Namun apa bila dilihat dari rata-rata produktivitas yang dapat dicapai per hektar adalah sebagai berikut; untuk perkebunan rakyat 4,04 kuintal, perkebunan besar 6,61 kuintal dan perkebunan swasta sebesar 3,72 kuintal. Dengan demikian produktivitas kopi secara nasional hanya sebesar 4,1 kuintal biji kopi kering per hektar per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas kopi yang dicapai saat ini baik oleh perkebunan rakyat, perkebunan besar nasional maupun perkebunan swasta relatif masih rendah apabila jika dibandingkan dengan potensi produktivitas yang dapat dicapai. Sebagai contoh data yang ditunjukkan oleh Ditjen Perkebunan (2003), bahwa potensi produktivitas kopi Robusta minimal dapat mencapai satu ton biji kering per hektar per tahun.

Di provinsi Lampung perkebunan kopi didominasi oleh perkebunan rakyat (Tabel 2), dengan jenis kopi adalah jenis kopi Robusta. Luas perkebunan rakyat di Lampung rata-rata 13 tahun terakhir (1990 – 2002) adalah seluas 147 509 hektar. Komoditas kopi rakyat ini merupakan tulang punggung produksi perkebunan di Lampung. Pertanaman kopi di provinsi Lampung ini umumnya terkonsentrasi di dua kabupaten yaitu Tanggamus dan Lampung Barat.

Tabel 2. Perkembangan Luas Areal dan Produktivitas Kopi di Provinsi Lampung, 1999-2002

Tahun	Luas Areal (ha)			Produktivitas (Kv/ha)				
	PR	PBN	PBS	PR	PBN	PBS		
1990	121150	-	121	121271	7,07	-	1,49	7,07
1991	121260	-	122	121382	7,08	-	1,56	7,07
1992	129997	-	150	130147	6,97	-	-	6,96
1993	129198	-	150	129348	7,03	-	-	7,03
1994	131330	-	122	131452	4,54	-	1,72	4,54
1995	131921	-	-	131921	5,61	-	-	5,61
1996	133392	-	-	133392	6,30	-	-	6,30
1997	133604	-	-	133604	5,81	-	-	5,81
1998	144095	-	122	144217	4,42	-	1,64	4,42
1999	131536	-	-	131536	7,20	-	-	7,20
2000	203578	-	1422	205000	4,92	-	-	4,92
2001	203280	-	-	203281	4,93	-	-	4,93
2002	203281	-	-	203281	4,93	-	-	4,93
Rata2	147509	-	315	147824	5,91	-	1,60	3,75
Trend (%)/thn	4,21	-	-	4,21	(1,75)	-	-	(1,75)
Trend sebelum krisis	1,44	-	-	1,44	(3,64)	-	-	(3,64)
Trend pasca krisis	5,14	-	-	5,14	(1,12)	-	-	(1,12)

Sumber : Ditjenbun,2002

Keterangan : PR (perkebunan Rakyat)
 PBN(perkebunan besar nasional)
 PBS (perkebunan besar swasta)
 Sebelum krisis adalah tahun1997 kebawah
 Setelah krisis adalah tahun 1998 keatas
 Nilai dalam kurung () berarti minus
 Tanda (-) tidak tersedia data

Laju pertumbuhan luas tanaman kopi di Lampung kurun waktu 13 tahun terakhir adalah 4,21% per tahun. Sedangkan bila dilihat dari dua sisi waktu yaitu sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia (1997 kebawah) dan setelah terjadinya krisis (1998 keatas), terjadi laju pertumbuhan luas areal kopi yang cukup berbeda. Sebelum terjadinya krisis ekonomi, laju pertumbuhan luas areal kopi per tahunnya adalah rata-rata 1,44%. Sedangkan setelah terjadinya krisis ekonomi, rata-rata luas areal tanaman kopi meningkat hampir 3,6 kali dari posisi sebelum terjadinya krisis yaitu dengan laju pertumbuhan per tahun rata-rata 5,14%.

Demikian juga efek krisis ekonomi terhadap produktivitas kopi per satuan luas. Sebelum terjadinya krisis ekonomi, laju pertumbuhan produktivitas kopi menurun rata-rata per tahunnya sebesar 3,64 persen, setelah terjadinya krisis ekonomi penurunan laju pertumbuhan produktivitas kopi berkurang menjadi rata-rata kurang 1,12 persen per tahun. Secara keseluruhan rata-rata produktivitas kopi di provinsi Lampung selama 13 tahun terakhir masih relatif kecil yaitu hanya 5,91 quintal biji kering per hektar per tahun.

Sehingga masih ada peluang untuk meningkatkan produktivitas kopi rakyat di Lampung melalui perbaikan budidaya.

Industri Pengolahan Kopi

Menurut data terakhir dari Statistik Perkebunan Provinsi Lampung 2002, menunjukkan bahwa jumlah perusahaan pengolah biji kopi menjadi produk jadi siap konsumsi yang berada di wilayah provinsi Lampung, terdapat 8 perusahaan dengan jumlah kapasitas riil diperkirakan kurang lebih 85 000 ton biji kopi kering pertahunnya, dengan produk hasil olahan berupa kopi bubuk dan kopi instan (Tabel 5).

Tabel 5. Jumlah Perusahaan, Kapasitas dan Hasil Olahan Industri Kopi di Lampung, 2004.

No.	Nama Perusahaan	Kapasitas(ton/thn)	Hasil Olahan
1.	PT. Nestle	20 000	Kopi Instan
2.	PT. Bola dunia	20 000	Kopi Bubuk
3.	PT. Jempol	20 000	Kopi Bubuk
4.	PT. Walter	20 000	Kopi Bubuk
5.	PT. Sinar Biru	20 000	Kopi Bubuk
6.	PT. Sinar Dunia	20 000	Kopi Bubuk
7.	PT. Siger	20 000	Kopi Bubuk
8.	PT. Indofood Jaya Raya	1 500	Kopi Instan
Asumsi Jumlah Kapasitas Riil		85 000	

Sumber: Dinas Perkebunan Propinsi Lampung, 2002.

Dari Tabel 5 diatas, terlihat bahwa kapasitas riil bahan baku yang dibutuhkan oleh pabrik pengolah biji kopi per tahunnya cukup besar, yaitu sekitar 85 000 ton. Jika dibandingkan dengan jumlah produksi biji kopi per tahun rata-rata selama 13 tahun (1990-2002) adalah sekitar 85 186 ton (Ditjenbun 2002), hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan antara penawaran dan permintaan kopi. Bila dilihat dari jumlah perusahaan yang dapat menampung produk kopi petani, terlihat tidak ada tendensi monopoli, malah terjadi persaingan yang cukup sehat.

Berdasarkan hukum ekonomi seharusnya tidak perlu terjadi fluktuasi harga kopi ditingkat petani yang cukup tinggi antar musim. Namun kenyataan dilapang harga biji kopi ditingkat petani selalu terjadi fluktuasi harga yang cukup tinggi dengan kisaran harga terendah

mencapai Rp 3500 dan tertinggi hingga Rp 6000 per kgnya. Fluktuasi yang begitu tinggi ini mungkin disebabkan oleh kegagalan pasar (*market failure*) atau kegagalan kebijakan (*policy failure*) misalnya kebijakan tarif. Hal ini perlu diteliti dan dicariakan solusinya agar petani kopi bisa terlindungi sehingga mereka mendapatkan harga yang cukup layak dan bersaing.

Aspek Kelembagaan Pendukung Agribisnis

1. Kelembagaan Kelompok Tani

Umumnya kelompoktani pada usahatani perkebunan belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan, tidak seperti kelompoktani pada usahatani tanaman pangan, khususnya padi yang relatif lebih maju. Kelompok tani tanaman perkebunan, sebagian sudah terbentuk dan sebagiannya belum terbentuk. Kelompok tani yang telah terbentuk, aktivitasnya juga masih sangat terbatas atau dapat dikatakan tidak memiliki aktivitas sama sekali. Sebagai contoh, di desa contoh kajian yaitu desa Way Harong, Kecamatan Pulau Pangung, Kab. Tanggamus, Lampung, kelompok taninya sudah terbentuk namun aktivitas kelompoknya tidak aktif sama sekali. Setelah kajian ini dilakukan diklompok tani yang telah terbentuk tersebut, aktivitas kelompoknya mulai terbangun berkat bimbingan dan arahan tenaga detaser dari kegiatan kajian ini.

Aktivitas yang mulai terbangun atas bimbingan tenaga detaser dari kegiatan kajian ini diantaranya adalah dalam hal kegiatan pemeliharaan tanaman kopi, mulai dari aktivitas pembersihan kebun, perbaikan jalan usahatani, penupukan kebun kopi, pemeliharaan tanaman kopi yang sudah tua melalui teknik sambung pucuk dan sistem berkelompok dalam aktivitas gotong royong pemeliharaan kebun kopinya. Aktivitas lainnya adalah dalam mengelola modal kelompok yang berasal dari modal bergulir bantuan dari kegiatan kajian ini. Sedangkan aktivitas seperti pemasaran hasil produksi belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Petani dalam hal pemasaran hasil masih berjalan sendiri-sendiri, belum secara berkelompok guna meningkatkan posisi tawar petani. Kenapa sistem berkelompok dalam pemasaran hasil sulit diterima petani, hal ini diantaranya disebabkan oleh keperluan maupun kemampuan akan memenuhi konsumsi keluarga sangat bervariasi antar petani. Sebagian memerlukan uang tunai segera setelah panen untuk membayar hutang dan keperluan konsumsi lainnya, sebagian petani yang relatif lebih berada sebaliknya, yaitu menahan hasil produksinya menunggu harga membaik. Dengan demikian, ada sebagian petani menjual hasil produksinya begitu panen selesai, sebagian lagi ada yang menjual hasil produksinya secara mencili sesuai kebutuhan, sebagian lagi khususnya bagi petani dengan modal yang lebih kuat, penjualan hasil produksinya menunggu harga tinggi. Pada kondisi yang beragam ini, dirasakan sulit untuk mengajjak petani menjual hasil produksi kopinya secara berkelompok.

Dengan terbangunnya aktivitas kelompok tani yang dibina oleh kegiatan kajian ini, Dinas terkait dalam hal ini Dinas Perkebunan setempat telah memanfaatkan kelompok ini menjadi kelompok tani kopi percontohan diwilayah kerjanya. Dukungan ini diwujudkan melalui bantuan permodalan kelompok berupa uang tunai, tahap pertama telah disalurkan sebesar tiga juta rupiah,

dan tahap kedua sebesar 5 juta rupiah. Modal ini telah ditransfer lewat rekening ketua kelompok tani, modal ini digunakan untuk penguatan modal kelompok dalam meningkatkan usahatani kopi.

2. Kelembagaan Sarana Produksi

Suksesnya kegiatan usahatani atau inovasi teknologi, harus didukung oleh tersedianya sarana produksi tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jenis yang dibutuhkan oleh petani. Seperti di desa contoh kegiatan kajian ini dilaksanakan, ketersediaan sarana produksi dalam hal ini pupuk an organik (Urea, SP 36, maupun KCL), cukup tersedia di kota kecamatan terdekat, walaupun jumlah kios yang menyediakan sarana produksi hanya satu buah harga pupuk yang ditawarkan masih cukup bersaing, tidak melebihi HET (harga eceran tertinggi) yang ditetapkan. Namun sebelum kajian ini dilaksanakan pemanfaatan kios ini oleh petani kopi belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh karena : (1) terbatasnya modal yang dimiliki petani kopi untuk membeli sarana pupuk secara tunai, (2) petani belum mengetahui secara benar cara pemberian pupuk baik takaran, jenis pupuk, maupun waktu pemberian yang tepat, (3) disamping itu petani belum yakin akan dampak hasil yang ditimbulkan khususnya terhadap keuntungan yang akan diperoleh dengan pemberian pupuk kepada tanaman kopinya.

Melalui kajian yang telah dilakukan dilahan petani dan sekaligus petani sebagai pelaku kegiatan ini, dapat dikatakan sebagai sekolah lapangan langsung, sehingga petani secara langsung dapat menyerap dan merasakan manfaat dari efek pemupukan yang dilakukan baik pupuk an organik maupun pupuk organik (kandang). Diharapkan dengan penguatan modal kelompok, baik yang berasal dari kegiatan kajian ini, maupun dari Dinas Perkebunan setempat, kemampuan petani membeli pupuk menjadi meningkat. Dengan ditunjukknya kelompok binaan ini, sebagai kelompok percontohan petani kopi, maka akan dapat mempengaruhi kelompok kopi lainnya, sehingga kedepan permintaan akan pupuk an organik maupun organik menjadi meningkat. Tentunya hal ini akan merangsang pihak swasta lainnya untuk mendirikan kios penyedia sarana produksi yang baru sehingga persaingan harga pupuk yang ditawarkan menjadi lebih sempurna.

Sampai saat ini jumlah Kios sarana produksi di kota kecamatan hanya satu buah, belum ada persaingan. Sistem pembelian yang ditetapkan adalah secara tunai, tidak boleh dikredit atau dihutang. Di kota kecamatan atau di desa belum ada lembaga yang menyediakan sarana produksi dengan sistem kredit, baik oleh lembaga perbankan formal maupun non formal seperti tengkulak. Kedepan diharapkan dengan tersosialisasinya hasil kajian ini, permintaan akan pupuk menjadi meningkat, jumlah kios yang menyediakan sana produksi meningkat, persaingan penawaran atau cara pembelian pupuk menjadi meningkat tidak hanya secara tunai tetapi juga dapat secara kredit, atau yarenen (bayar setelah panen). Sehingga akses petani kopi terhadap sarana produksi yang dibutuhkan menjadi lebih terbuka.

3. Kelembagaan Pasca Panen

Keberadaan kelembagan ini sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas hasil produksi kopi petani. Namun sampai saat ini kelembagaan ini belum terbentuk di desa contoh

kajian. Kegiatan pasca panen dilakukan oleh petani sendiri, biji kopi setelah panen dijemur di depan rumah masing-masing, setiap petani umumnya memiliki lantai jemur walaupun dengan luasan maupun kualitas lantai jemur yang berbeda antar petani. Setelah biji kopi dikeringkan 3 sampai 5 hari dengan sinar matahari, biji kopi yang masih ada kulitnya lalu disimpan, pengupasan kulit biji kopi yang sudah kering itu dilakukan pada saat petani mau menjual kopinya, jadi bentuk yang dijual adalah berupa biji yang telah dikupas terlebih dahulu.

Pengupasan kulit biji dilakukan dengan mesin pengupas melalui sistem borongan ditempat yang khusus memiliki mesin pengupas, pemilik mesin pengupas ini umumnya petani atau petani merangkap pedagang kopi. Kualitas kopi yang dijual oleh petani dikategorikan kopi asalan oleh pedagang pengumpul, sehingga penentuan harga lebih dominan ditentukan oleh pedagang, sehingga posisi tawar petani menjadi lemah, dalam hal ini petani sebagai penerima harga (*price taker*).

Untuk meningkatkan kualitas biji kopi, kedepan akan dirintis melalui pengupasan biji kopi basah. Kopi begitu habis dipetik lalu dikupas secara basah dengan alat mesin pengupas, kemudian dicuci atau dibersihkan lalu dijemur. Dengan pengupasan sistem basah ini dapat meningkatkan kualitas biji kopi, biji kopi menjadi lebih mengkilap dan lebih bernas, sehingga harganya menjadi lebih tinggi. Menurut PPL setempat yang telah studi banding ke sentra produksi kopi di provinsi Bali, pada jenis kopi yang sama (Robusta) dengan sistem pengupasan basah harga kopi dapat mencapai Rp 7000 hingga Rp 8000 per kg, sedangkan dengan sistem pengupasan kering seperti yang dilakukan petani di provinsi Lampung harga yang dapat dicapai hanya Rp 4000 hingga Rp 5000 per kg. Sehingga terjadi perbedaan hampir Rp 3000 per kg, apabila sistem ini dapat dikembangkan di Lampung maka peluang perbedaan harga sampai Rp 3000 per kg bisa dinikmati oleh petani kopi.

4. Kelembagaan Pemasaran Hasil

Untuk meningkatkan pendapatan petani kopi, disamping dapat diempuh melalui peningkatan produktivitas per satuan luas, faktor yang sangat menentukan adalah jaminan harga yang layak. Harga merupakan faktor eksternal, penentuannya atau terjadinya harga atau keseimbangan harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran, serta juga sangat dipengaruhi oleh keadaan produksi domestik atau perdagangan laur negeri. Sehingga terjadinya harga pasar diluar kemampuan Departemen Pertanian. Namun demikian yang dapat diatasi adalah agar pembagian margin antar pelaku pasar dapat lebih saling menguntungkan bukan saling mengeksploitir satu sama lain antara produsen dan pembeli. Untuk dapat mengendalikan hal ini maka, pembentukan kelembagaan pasar yang berpihak kepada produsen dalam hal ini petani sangat dibutuhkan. Namun kenyataan dilapang, kelembagaan yang dimaksud belum ada seperti yang diharapkan. Harga pasar yang terbentuk lebih disebabkan oleh kekuatan tarik menarik antara permintaan dan penawaran, dan umumnya tingkat harga yang terjadi lebih ditentukan oleh kekuatan permintaan (pedagang), dalam hal ini petani hanya sebagai penerima harga.

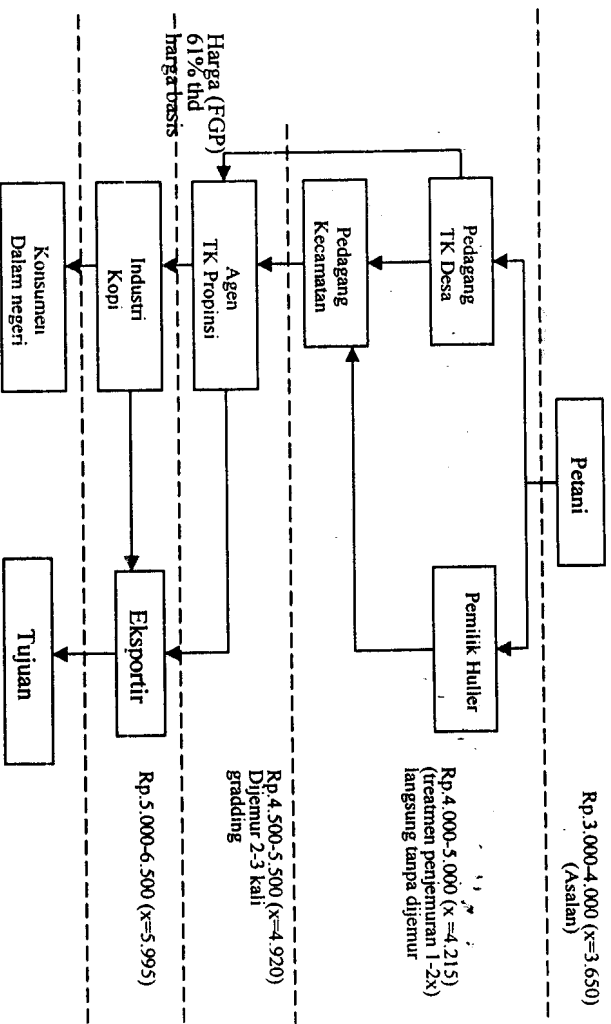
Disadari pembentukan kelembagaan pasar untuk meningkatkan posisi tawar petani tidaklah gampang, melihat dari beragamnya kepentingan konsumsi dan kemampuan modal yang dimiliki antar petani. Namun hal itu tidak boleh menyurutkan niat baik untuk berpinak kepada petani, paling tidak usaha yang dapat ditempuh adalah agar pembagian margin pemasaran yang lebih adil antara pihak produsen dan pedagang. Disamping itu melalui perbaikan kualitas hasil produksi, diharapkan petani mendapatkan harga yang lebih layak, memberikan informasi pasar dan membuka akses petani kepada pedagang ditingkat yang lebih tinggi (Kecamatan, kabupaten, provinsi atau pedagang besar (agen besar) agar biaya pemasaran dapat ditekan atau tidak tinggi. Mendukung terbentuknya kelompok tani ditingkat desa yang peduli terhadap perbaikan mutu produk melalui penerapan teknologi.

5. Saluran Pemasaran Kopi

Berdasarkan hasil survei pemasaran produk kopi ditingkat petani, didapat bahwa umumnya petani kopi di daerah kajian menjual hasil kopinya berupa biji kopi kering. Prilaku petani didalam menjual hasil produknnya berpariasi antar petani, sebagian langsung menjual hasilnya dalam jumlah besar bogitu habis panen, sebagian lagi menjual secara mencicil sesuai kebutuhan dan menunggu harga membaik dibandingkan waktu panen. Secara umum masalah pemasaran hasil tidak ada hambatan yang dirasakan petani, berapa jumlah yang mau dijual pasar siap menerimanya, namun yang menjadi masalah adalah tingkat harga yang diterima petani yang relatif rendah. Disamping itu pedagang tidak membedakan kualitas kopi petani, semua produk biji kopi petani dinilai sebagai kualitas asalan, sehingga harganya tetap menjadi lebih murah, walaupun petani telah melakukan usaha untuk meningkatkan muu hasil biji kopinya.

Ditingkat desa terdapat banyak pembeli kopi sebagai kaki tangan agen pedagang besar, sehingga terjadi persaingan harga, namun bila ditelusuri kelingkat agen pedagang besar, jumlah agen pembeli kopi ditingkat provinsi tidak begitu banyak dan antar agen satu dengan lainnya masih ada hubungan famili. Dengan demikian kenyataannya bentuk pasar kopi ditingkat provinsi adalah oligopoli atau hampir monopoli. Dengan demikian posisi petani kopi menjadi semakin kurang kuat dalam menentukan harga.

Bila dilihat dari saluran pemasaran hasil biji kopi petani relatif sederhana, dari petani kepedagang desa, atau langsung kepedagang tingkat kecamatan. Tingkat harga yang diterima petani produsen jenis kopi asalan adalah Rp 3000 hingga Rp 4000 per kg. Pedagang tingkat desa atau kecamatan melakukan sortasi dan pengeringan tambahan terhadap hasil pembeliamya dari petani, sehingga harga penjualannya kelingkat pedagang besar atau agen menjadi meningkat menjadi Rp 4000 hingga Rp 5000 per kg nya. Pedagang besar atau agen melakukan grading dan pengeringan dengan kadar air mencapai idial untuk diproses sebagai bahan baku industri atau diekspor. Tingkat harga yang diterima industri kopi atau eksportir menjadi berkisar antara Rp 6000 hingga Rp 7500 per kg nya. Dengan demikian bila dibandingkan antara tingkat harga yang diterima petani dan harga yang diterima ditingkat industri atau eksportir (basis), petani hanya menerima 50 persennya atau maksimum hanya 60 persen dari harga basis (Gambar 1).



Gambar 1. Saluran pemasaran kopi di Desa Way Harong, Pulau Pungung, Tanggamus, Lampung.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

1. Perkembangan luas areal maupun produktivitas kopi dekade terakhir baik secara nasional maupun di Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan yang relatif rendah. Rata-rata produktivitas kopi baik nasional maupun di Provinsi Lampung menunjukkan rata-rata kurang dari 5 kuintal per hektar biji kering per tahunnya. Sedangkan menurut hasil penelitian potensi hasil kopi Robusta dapat mencapai diatas satu ton per hektar. Rendahnya produktivitas kopi petani disebabkan karena teknologi yang diterapkan petani masih rendah terutama dalam pemeliharaan khususnya penerapan pemupukan. Sehingga mengakibatkan besarnya terjadinya senjangan hasil (yield gap), hal ini merupakan tantangan dan peluang untuk dapat menekan senjangan hasil tersebut, melalui inovasi teknologi.
2. Jenis perkebunan kopi didominasi oleh perkebunan rakyat yaitu hampir 95 persen dari total luas perkebunan kopi. Oleh sebab itu keberhasilan menekan senjangan hasil yang terjadi atau meningkatkan produktivitas kopi mendekati potensi hasil, secara otomatis berdampak langsung kepada pendapatan petani kopi, karena sebagian besar tanaman kopi ini diusahakan oleh petani.
3. Bila dilihat antara jumlah permintaan dan penawaran biji kopi di provinsi Lampung relatif seimbang, dimana kapasitas terpasang industri kopi yang ada di Lampung berkisar 85 000 ton biji kopi per tahunnya sedangkan produksi biji kopi dekade terakhir juga sekitar 85 000 ton. Namun harga kopi selalu mengalami fluktuasi, lebih-lebih pada saat panen raya harga kopi bisa jatuh ketitik terendah. Hal ini bisa terjadi karena Lampung juga disuplai dari Provinsi tetangga yaitu Sumatra Selatan dan Bengkulu. Upaya yang dapat ditempuh menghindari jatuhnya harga kopi adalah melalui peningkatan kualitas biji kopi ditingkat petani misalnya melalui pengolahan

4. Kelembagaan pendukung yang ada untuk usaha agribisnis kopi ditingkat petani cukup mendukung, hanya kelembagaan kelompok tani yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, bahkan beberapa tempat ada yang belum memiliki wadah kelompok tani. Sedangkan kelembagaan sarana produksi seperti kios pupuk dan pestisida cukup tersedia ditingkat petani walaupun jumlahnya masih terbatas. Hanya fasilitas kredit atau modal tunai yang tidak tersedia sama sekali, pada hal masalah pokok kerapa petani belum memelihara tanaman kopinya secara maksimal khususnya pemupukan adalah terbatasnya modal tunai yang dimiliki oleh petani. Agar inovasi teknologi kopi berjalan sesuai harapan, maka keberadaan fasilitas kredit menjadi syarat keharusan ditingkat petani.
5. Kelembagaan pemasaran cukup memadai ditingkat desa, dalam arti jumlah pedagang pengumpul tingkat desa maupun tingkat kecamatan atau kabupaten, sistem pembayaran yang dilakukan secara tunai. Namun kenyataan setiap panen raya harga selalu rendah. Berdasarkan hasil penelitian harga yang diterima petani hanya 50 hingga 60 persen dari harga ditingkat industri atau eksportir, ini berarti biaya perdagangan termasuk transportasi, pergudangan, grading dan handling mencapai 40 hingga 50 persen dari harga ditingkat industri atau eksportir. Untuk mengantisipasi hal ini adalah dengan jalan regulasi, yaitu meningkatkan efisiensi pemasaran hasil sehingga pembagian margin pemasaran menjadi lebih adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman Hutabarat, dkk., Analisis Dampak Libralisasi Produk pertanian Terhadap Daya Saing Komoditas Perkebunan Utama. Laporan Akhir, Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Departemen Pertanian, Jakarta 2003.
- Dinas Perkebunan Provinsi Lampung 2002. Data Base dan Laporan Tahunan, Disbun Bandar Lampung.
- Dirjen Bina Produksi Perkebunan 2002, Statistik Perkebunan Indonesia 2000 – 2002. Dirjen Bina Produksi Perkebunan Departemen pertanian, Jakarta 2002.
- Dirjen Bina Produksi Perkebunan : Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkopian, Warta Pusat Penelitian Perkebunan Kopi dan Kakau Indonesia, Vol 19, No 1, Feb 2003.
- Irawan B, Purwoto A, Saleh C, Supriatna A, Kirum N.A. 2000. Laporan Hasil Penelitian Pengembangan Model Kelembagaan Konservasi Lahan Pertanian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Pertanian 2000.
- Martadinata dan S.Wardani. Pengaruh, Produksi Kopi Robusta terhadap Harga Pokok, Warta Perkebunan 1996. Unit Penelitian Bioteknologi Perkebunan Bogor.
- Nasocion L.I. 1994. Kebijakan Pertanian Nasional dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi: Pengalaman Masa Lalu, Tantangan dan Arah ke Masa depan. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Nasocion L.I. dan Widodo J. 1995. Masalah Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya terhadap Keberlanjutan Swasembada Pangan. Lokakarya Persaingan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air-Kerjasama Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Jaringan Komunikasi Irigasi Indonesia dan The Ford Foundation 1995.